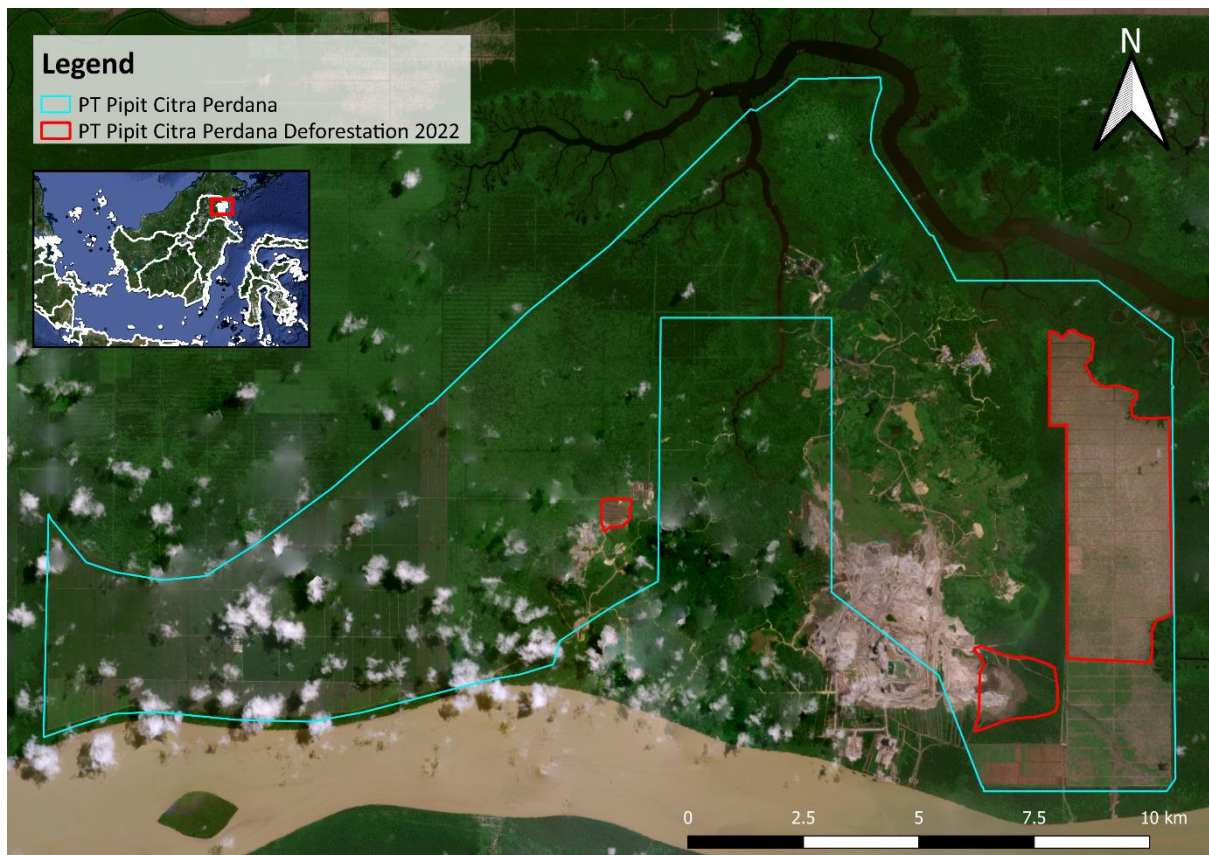


Sepuluh konsesi perusahaan kelapa sawit di Indonesia telah membuka 8.100 ha lahan hutan dan gambut sepanjang tahun 2022

Analisis dilakukan oleh AidEnvironment terhadap konsesi perusahaan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini dengan deforestasi terbanyak dalam enam bulan pertama tahun 2022 sekali lagi menunjukkan Indonesia tetap menjadi *hotspot* deforestasi di region tersebut. Sepuluh konsesi kelapa sawit secara bersama-sama berkontribusi terhadap 8.100 ha deforestasi dan semua konsesi yang masuk dalam daftar 10 besar berlokasi di Indonesia. Dua dari 10 konsesi perusahaan pada periode ini berada di Papua, 3 di Sumatera, dan sisanya di Kalimantan.

1. PT Pipit Citra Perdana

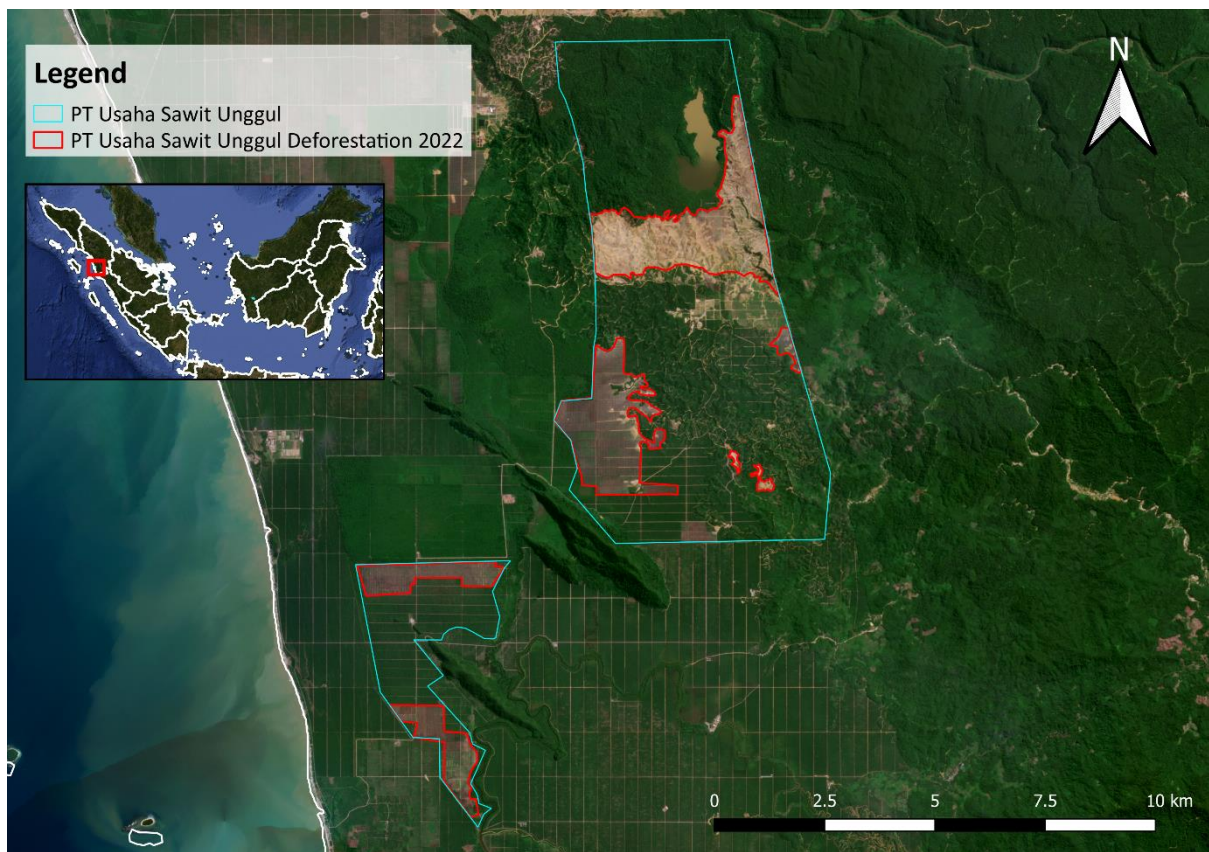
Deforestasi terbesar di dalam konsesi kelapa sawit diantara bulan Januari hingga Juni 2022 terdeteksi di dalam konsesi kelapa sawit milik PT Pipit Citra Perdana di Tana Tidung, Kalimantan Utara. Seluas 1.600 ha deforestasi ditemukan dalam konsesi tersebut. PT Pipit Citra Perdana merupakan bagian dari Pipit Group, perusahaan milik Kristianto Kandi Saputro dan keluarga. Hanya sedikit informasi mengenai Kristianto Kandi Saputro, kecuali beberapa hubungan yang jelas dengan perusahaan pertambangan batu bara, [PT Pipit Mutiara Jaya](#). Sebuah [website](#) yang kelihatannya sudah tidak aktif juga menunjukkan bahwa Pipit Group memiliki beberapa lini bisnis, antara lain perusahaan *engineering*, logistik, pertambangan, dan kelapa sawit. Pipit Group diketahui memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit lain bernama PT Nunukan Bara Sukses. Tidak diketahui adanya hubungan antara Pipit Group dan rantai pasokan manapun, baik yang tercakup dalam kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) atau perusahaan yang memasok pada pasar *leakage*.



Gambar 1 Deforestasi PT Pipit Citra Perdana diantara bulan Januari hingga Juni 2022

2. PT Usaha Sawit Unggul

Di posisi kedua adalah PT Usaha Sawit Unggul di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada semester pertama tahun 2022, PT Usaha Sawit Unggul membuka hutan seluas 1.500 ha. PT Usaha Sawit Unggul pernah menjadi bagian dari [Asian Agri Group](#), yang merupakan bagian dari [Royal Golden Eagle \(RGE\)](#). PT Usaha Sawit Unggul kini beroperasi dibawah grup Jalan Abesin Limited, sebuah grup perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands. Jalan Abesin Limited tampaknya tidak menerbitkan informasi publik apapun, sehingga tidak ada informasi yang tersedia mengenai rantai pasokan grup perusahaan.



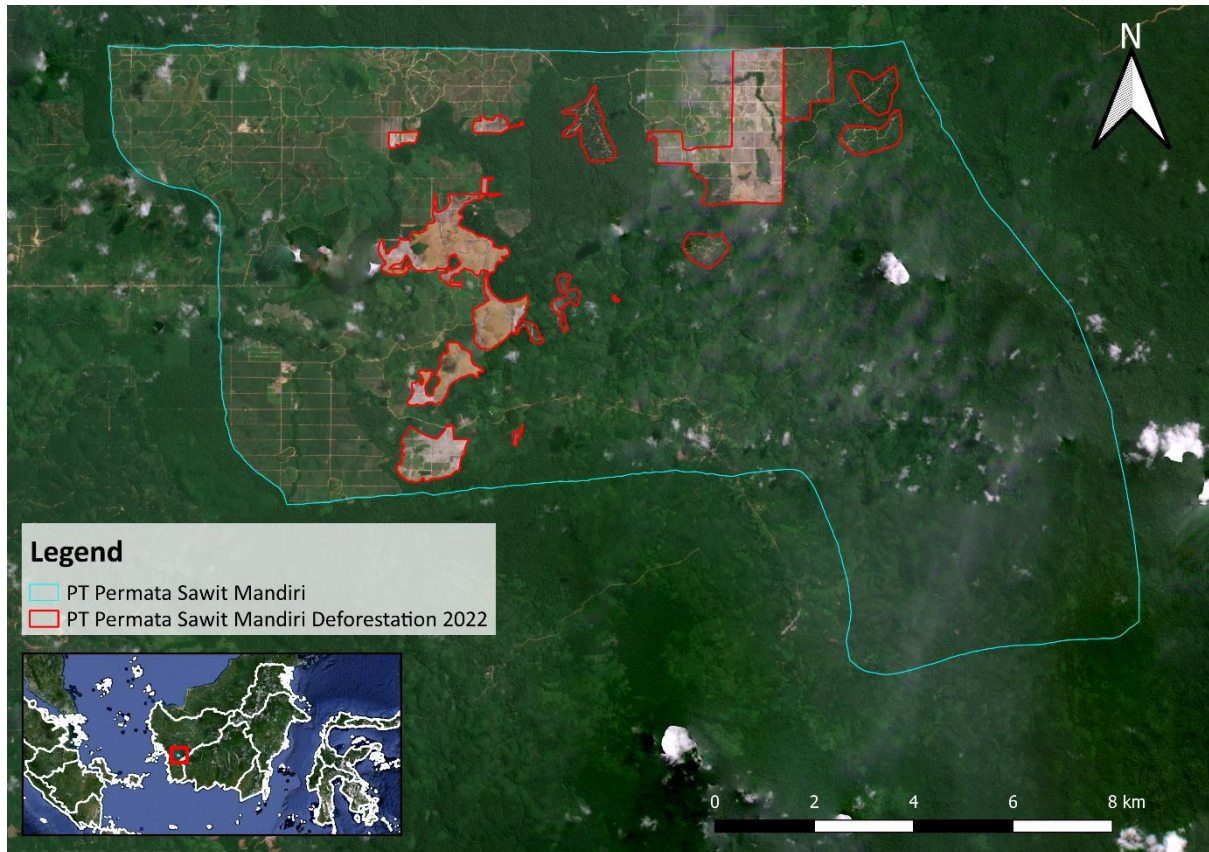
Gambar 2 Deforestasi oleh PT Usaha Sawit Unggul diantara bulan Januari hingga Juni 2022

3. PT Permata Sawit Mandiri

Konsesi deforestasi terbesar ketiga adalah PT Permata Sawit Mandiri. Konsesi tersebut sebelumnya telah [muncul](#) dalam analisis deforestasi Aidenvironment dan telah lama berada di tinjauan LSM, serta dulunya pernah [dioperasikan](#) oleh perusahaan minyak sawit Malaysia [Genting](#). Dalam dua kuartal pertama tahun 2022, PT Permata Sawit Mandiri membuka hutan sekitar 1.300 ha. Konsesi tersebut berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan saat ini dimiliki oleh seorang bernama Ikhsanudin. Informasi publik tentang pemilik perusahaan sangat terbatas dan upaya organisasi masyarakat sipil untuk *engage* dengan perusahaan tersebut tidak berhasil.

[Analysis](#) Aidenvironment terhadap konsesi di Indonesia dengan sebagian besar habitat orangutan hutan yang tersisa menunjukkan bahwa PT Permata Sawit Mandiri memiliki 5.000 ha habitat yang tersisa, jumlah habitat terbesar kesepuluh di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menurut [orangutan population and habitat viability assessment tahun 2017](#), konsesi tersebut memiliki populasi 25-30 individu orangutan. Pada tahun [2017](#), siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyebutkan adanya kerjasama antara pemerintah dan PT Permata

Sawit Mandiri untuk mengelola kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), namun tidak ada informasi publik mengenai kelanjutan dan hasil bagi upaya perlindungan tersebut. PT Permata Sawit Mandiri sebelumnya pernah masuk ke rantai pasok NDPE melalui pabrik perusahaan [Goodhope](#), namun pada akhir Januari 2022, Goodhope tidak lagi membeli tandan buah segar dari perusahaan tersebut.



Gambar 3 Deforestasi oleh PT Permata Sawit Mandiri diantara bulan Januari hingga Juni 2022

4. PT Wana Jaya Abadi

PT Wana Jaya Abadi adalah konsesi kelapa sawit milik Bengalon Jaya Lestari yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara. Pada semester pertama tahun 2022, PT Wana Jaya Abadi membuka hampir 700 ha hutan gambut. Informasi yang diperoleh dari akta notaris Indonesia [menunjukkan](#) bahwa Bengalon Jaya Lestari dimiliki tiga orang yaitu: Cindra Darmanto, Iskandar Riyanto, dan Candra Gunawan. Dari dokumen audit diketahui bahwa PT Wana Jaya Abadi memiliki total landbank seluas 3.206 ha. Bengalon Jaya Lestari diyakini tidak mengoperasikan pabrik kelapa sawit dan rantai pasokan PT Wana Jaya Abadi tidak diketahui.

5. PT Inti Kebun Sawit

Di posisi kelima ada PT Inti Kebun Sawit di Sorong, [Papua](#). Pada semester pertama tahun 2022, perusahaan tersebut diketahui telah membuka hutan seluas 660 ha. PT Inti Kebun Sawit dulunya adalah bagian dari grup Kayu Lapis Indonesia. Pada tahun 2020, konsesi tersebut, bersama dengan dua perkebunan kelapa sawit milik Kayu Lapis Indonesia di Papua (PT Inti Kebun Sejahtera dan PT Inti Kebun Lestari), dijual ke Ciliandry Anky Abadi (CAA). Ciliandry Anky Abadi adalah grup perusahaan yang dimiliki oleh Ciliandry dan Wiras Fangiono, yang merupakan bagian dari keluarga besar Fangiono dibalik perusahaan kelapa sawit yang berbasis di Singapura, [First Resources](#). First Resources saat ini menjadi subjek [complaint](#) RSPO karena ketidakjelasan kepemilikan antara kedua grup dan grup afiliasi

FAP-Agri. First Resources secara konsisten [menyangkal](#) bahwa perusahaan-perusahaan tersebut saling terkait, meskipun [semakin banyak bukti](#) bahwa mereka seharusnya dianggap sebagai satu perusahaan.

Selain deforestasi, PT Inti Kebun Sawit juga terlibat dalam kasus [konflik sosial](#) dengan [masyarakat adat](#) di sekitar konsesi. Konsesi tersebut diduga berada di dalam hutan adat dan kemungkinan diperoleh perusahaan tanpa persetujuan masyarakat.

6. PT Sawit Sukses Sejati

PT Sawit Sukses Sejati berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Perusahaan telah membuka hutan sekitar 660 ha diantara bulan Januari dan Juni 2022. Sebelumnya, konsesi itu dioperasikan dengan nama “PT Anugerah Langkat Makmur”, yang dimiliki oleh pengusaha Sumatera, almarhum Haji Anif. PT Sawit Sukses Sejati telah mengakuisisi konsesi dari Anugerah Langkat Makmur pada tahun [2021](#).

Saat ini konsesi beroperasi sebagai PT Sawit Sukses Sejati, dibawah grup Jalan Abesin Limited. Jalan Abesin Limited adalah grup perusahaan yang terdaftar di British Virgin Island dan tampaknya tidak mempublikasikan informasi publik apapun. Dengan demikian, tidak ada informasi yang memadai mengenai rantai pasokan grup perusahaan tersebut. Ini bukan pertama kalinya perusahaan tersebut dituduh melakukan deforestasi. Sebelum mengubah kepemilikan dan nama perusahaan, PT Anugerah Langkat Makmur dituding melanggar peraturan pemerintah dengan mengubah hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit pada [2019](#).

7. PT Sawit Rokan Semesta

PT Sawit Rokan Semesta telah membuka hutan seluas 600 ha selama paruh pertama tahun 2022. Konsesi tersebut terletak di Rokan Hulu, Riau di Sumatra. PT Sawit Rokan Semesta dimiliki oleh keluarga Widjaja dari Sumatera Utara. Keluarga Widjaja ini tergabung dalam Grup Sewangi, sebuah perusahaan kelapa sawit yang berbasis di Medan, Sumatera Utara. Grup Sewangi muncul di rantai pasokan NDPE melalui [AAK](#), [ADM](#), Avon, [BASE](#), [Bunge](#), [Cargill](#), [Danone](#), [Friesland Campina](#), [Fuji Oil](#), [Golden Agri Resources \(GAR\)](#), [Grupo Bimbo](#), [Innospec](#), [Itochu](#), [Johnson&Johnson](#), [KAO](#), [KLK](#), [Kellogg’s](#), [Mondelēz](#), [Nestlé](#), [Olam](#), [Olenex](#), [Oleon](#), [Pepsico](#), [P&G](#), [Unilever](#), [Vandemoortele](#), dan [Wilmar](#).

8. PT Kartika Nugraha Sakti

Di posisi selanjutnya PT Kartika Nugraha Sakti yang juga merupakan bagian dari Bengalon Jaya Lestari. Konsesi tersebut telah membuka 570 ha lahan selama periode pemantauan, semuanya berada di hutan gambut. Basis data AidEnvironment tidak mencatat keberadaan pabrik kelapa sawit di bawah perusahaan grup sampai sekarang. Informasi yang diperoleh dari akta notaris Indonesia [menunjukkan](#) bahwa grup perusahaan tersebut dimiliki oleh tiga orang yaitu: Cindra Darmanto, Iskandar Riyanto, dan Candra Gunawan. Dari dokumen audit diketahui PT Wana Jaya Abadi memiliki total *landbank* seluas 3.206 ha. Hubungan PT Wana Jaya Abadi dengan rantai pasokan NDPE tidak diketahui.

9. PT Tridaya Hutan Lestari

PT Tridaya Hutan Lestari mengoperasikan konsesi di Berau, Kalimantan Timur. Konsesi tersebut membuka hutan seluas 250 ha diantara bulan Januari hingga Juni 2022. Area konsesi milik PT Tridaya Hutan Lestari dulunya adalah PT Anugrah Surya Mandiri, yang beroperasi dibawah perusahaan kelapa sawit Malaysia, Kuala Lumpur Kepong (KLK). Pada awal tahun 2020, KLK [mengumumkan](#) telah menempatkan PT Anugrah Surya Mandiri dalam “likuidasi sukarela” dan “PT ASM saat ini tidak aktif....”. [Dokumen](#) verifikasi PT Tridaya Hutan Lestari menyebutkan hingga bulan Mei 2019 areal milik

PT Anugrah Surya Mandiri telah diakuisisi oleh PT Tridaya Hutan Lestari. Perusahaan ini dioperasikan oleh Ciliandry Anky Abadi, pemilik PT Inti Kebun Sawit. Ciliandry Anky Abadi memasuki rantai pasokan NDPE melalui [Grupo Bimbo](#) dan [Mondelēz](#).

10. PT Permata Nusa Mandiri

Menutup daftar 10 besar pelaku deforestasi adalah PT Permata Nusa Mandiri, perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan oleh pengusaha Indonesia yang bernama Anthoni Salim. PT Permata Nusa Mandiri beroperasi di Jayapura, Papua. Anthoni Salim berada dibalik [Grup Salim](#), sebuah grup perusahaan yang menjalankan beberapa lini usaha seperti perkebunan kelapa sawit (dibawah Salim Ivomas Pratama dan IndoAgri), media, toko kelontong dan usaha lainnya. PT Permata Nusa Mandiri membuka hutan seluas 170 ha dalam enam bulan pertama tahun 2022.